



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SUB UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUYONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
3. NHK : **21917**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/126 m2 di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 628 m2/144 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.650.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 478.765.836**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.250.415.836**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.250.415.836

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.